

	News Title : Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia	
	Media Name : Sawitindonesia.com	Journalist : Redaksi SI
	Publish Date : 22 May 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Berita Terbaru	Topic : Perdagangan Berjangka

News - Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia

BERITA TERBARU

Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia

BY REDAKSI SI - 3 HOUR AGO · 4 MIN READ



Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berkomitmen memperlakukan pemertamaan perdagangan berjangka komoditi (PBC) di Indonesia. Selain itu, Bappebti akan terus mendemonstrasikan berbagai kebijakan dan perkembangan terkait para pemangku kepentingan agar kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan.

Hal ini disampaikan Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam konferensi pers perkembangan isu terkait sektor PBC di Jakarta, Jumat (19/5).

"Bappebti perlu mengedukasi dan memberikan pemahaman yang benar terkait berbagai isu terkait di bidang PBC, baik kepada pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat umum. Hal ini untuk menciptakan ekosistem yang nyaman dan terpercaya di bidang PBC," tegas Didid.

Dalam kesempatan ini, Didid memberikan informasi perkembangan terkini di bidang PBC. Di antaranya kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka di Indonesia, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tindak lanjut UU No. 4/2022, Expert Assessment (EA) untuk penanggulangan kasus robot trading, pengamatan Sistem Resi Gudang (SRG), dan tindak lanjut Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI.

Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia

Didid menjelaskan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka merupakan terobosan atau inovasi Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan kinerja ekspor CPO dan pendapatan negara melalui pajak ekspor. Hal ini juga sejalan dengan mandat UU No. 22/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/2011.

Baca juga : Harga TBS di Riau Naik Rp 471,84/Kg

"Kebijakan yang diatur adalah ekspor untuk CPO HS 15111000. Nantinya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Bursa Berjangka di Indonesia yang dijuruk oleh Bappebti. Selain Pemerintah tentunya ekspor kami juga tengah menargetkan Peraturan Bappebti serta Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Bursa Berjangka," tegas Didid.

Dengan diimplementasikannya kebijakan tersebut, diharapkan akan terbentuk harga acuan CPO di bursa. Harga yang terbentuk akan transparan, akurat, dan real time. Sehingga dapat digunakan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) oleh Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai (BK) oleh Kementerian Keuangan. Di sisi hulu, kebijakan ini juga dapat memperbaiki harga tandan buah segar bagi petani. Kementerian Perdagangan menargetkan pada Juni 2023 sudah dilakukan peluncuran kebijakan tersebut.

RPP Tindak Lanjut UU No. 4/2022

Sebagaimana diketahui, pengaturan dan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto dan derivatifnya akan diadopsi dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RPP ini akan mengatur mekanisme pengalihan tersebut. Prinsipnya, mekanisme pengalihan harus seminimal mungkin memberikan guncangan pada industri.

"Selain, pengalihan tersebut harus berdampak positif bagi perkembangan industri dan stabilitasi sektor keuangan. Bappebti akan terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk menjaga masa transisi peralihan tersebut berjalan dengan baik," tegas Didid.

Baca juga : ET Parlina (Persero) Memberikan Fasilitas Kepada 50 Unit UMKM Dalam Program Penyalangan Asesment Untuk sertifikasi Halal

Expert Advisor (EA) Untuk Penanggulangan Kasus Robot Trading

Dalam rangka mengungkap masalah kasus yang mengancam stabilitas industri robot trading, Bappebti telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Bappebti Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi melalui EADI bidang PBC yang mengatur tentang penasihat berjangka.

Tugasnya adalah memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syaria, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan memisalkan imbalan. Saat ini Bappebti telah memberikan persetujuan Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka tersebut.

Pengaturan SRG untuk Oriental Ekspor

Didid mengatakan, SRG yang awalnya hanya fokus untuk menjamin ketersediaan pasokan komoditas khususnya bahan pangan dalam negeri, saat ini juga berorientasi ekspor. "Masyarakat akan mudah mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau serta pelaku usaha dan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat masuk ke pasar internasional dengan menggunakan mekanisme penyimpanan komoditi di gudang SRG," tegasnya.

Didid menambahkan, untuk optimalisasi SRG, akan diadakan Bulan Lisensi SRG dan PLK pada Mei 2023. Pembukaan Lisensi tersebut dijadwalkan pada 22 Mei 2023 di Subang, Jawa Barat. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain seminar, kuliah umum, dan pertemuan dengan pemangku kepentingan di daerah.

Baca juga : SIPKBERN Memperkuat Database Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit

Tindak Lanjut LAHP Ombudsman RI

Bappebti mengapresiasi Ombudsman yang telah memberikan masukan dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan kinerja Bappebti. Terkait proses perizinan Bursa Kripto masih berjalan dan Bappebti terus berkomitmen mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Bappebti memberi kesempatan kepada seluruh pelaku usaha untuk mencalonkan dirinya menjadi Bursa Kripto, namun calon bursa harus kredibel dan kompeten. Selanjutnya, Bappebti berkomitmen akan memilih Perusahaan Calon Bursa Penyelenggara Aset Fisik Kripto yang mampu melindungi masyarakat" pungkas Didid.

Untuk penguatan pelayanan publik di lingkungan Bappebti, telah dibentuk LNI Bappebti sebagai layanan informasi Bappebti dan pengelola aduan masyarakat. Selain itu, Bappebti juga bekerja sama dengan Biro Humas Kementerian Perdagangan melalui SP-ANLAP yang menangani isu-isu terkait Bappebti.

Bappebti juga telah melakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Bursa Berjangka. Sedangkan, dalam proses integrasi sistem perizinan dengan sistem Intrade, Bappebti bekerja sama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan.

Penggiatan literasi dilakukan Bappebti melalui kerja sama dengan asosiasi, Kamis Dagang Indonesia (Kadi) dan pemangku kepentingan lain. Hal ini merupakan kunci dalam menjalankan strategi pemertamaan perdagangan aset kripto dan PBC di Indonesia, menggarang aduan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sumber: kemendag.go.id